

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aswar Annas. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*.

Bambang Waluyo. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika Offset.

Domai, T. (2011). *Sound Governance*. Universitas Brawijaya.

Dr. Joko Widodo, M. . (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.

Press, G. M. U. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
In Agus Dwiyanto.

Prof. DR. C. F. G Sunaryati Hartono, SH (2005). *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik*. Komisi Ombudsman Nasional

Rismawati, S. E., & Mattalata, S. E. (2018). *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Celebes Media Perkasa.

Bogdan, & Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*.

Guba, E. G. (1990). *The Alternative Paradigm Dialog*. Sage Publication. Nugrahani,

F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan*

Bahasa. *Cakra Books*, 1(1), 305.

Jurnal:

Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi

Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding:*

Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 417.

<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.34>

Aslam, N. (2022). Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif

Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359–372.

<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>

Aswar Annas. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*.

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zzo1DwAAQBAJ&oi=fnd>

&pg=PR1&dq=Adapun+bentuk-

bentuk+kerjasama+dalam+teori+sosiologi+(Soekanto,+2007)+mengemukakan

an+bahwa+kerjasama+memiliki+empat+bentuk+kerjasama,+antara+lain:++a

)%09Kerjasama+spontan,+ialah+ker

Asyikin, N. (2020). Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan

Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*,

4(1), 80. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.316>

Bambang Waluyo. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan*

Optimalisasi). Sinar Grafika Offset.

Bogdan, & Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu*

Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial.

Dedy Suryana, K. (2020). Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48–57.
<https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.161>

DOMAI, T. (2011). *Sound Governance*. Universitas Brawijaya.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gJGZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kerjasama+pada+hakekatnya+mengindikasikan+adanya+dua+pihak+atau+lebih+berinteraksi+secara+dinamis+untuk+mencapai+suatu+tujuan+bersama+yang+sebagaimana+dijelaskan+oleh+Ramses+dan+B>

Dony Endrassanto. (2021). *STUDI ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. 2.*

Dr. Joko Widodo, M. . (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. In *Banyu Media Publishing*. Media Nusa Creative.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Widodo.+2011.+Analisis+Kebijakan+Publik:+Konsep+dan+Aplikasi+Analisis+Proses+Kebijakan+Publik.+Malang:+Bayu+Media.&ots=NjN4We_7zD&sig=vWLCvnaHWbXAOVLuVPsWyNHMsf0&redir_esc=y#v=one

Dr. Joko Widodo, M. . (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*

Analisis Proses Kebijakan Publik. Media Nusa Creative.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Widodo.+2011.+Analisis+Kebijakan+Publik:+Konsep+dan+Aplikasi+Analisis+Proses+Kebijakan+Publik.+Malang:+Bayu+Media.&ots=NjN4We_7zD&sig=vWLCvnaHWbXAOVLuVPsWyNHMsf0&redir_esc=y#v=one

Farida Sekti Pahlevi. (2022). *Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia.* 4(1).

Global Highlights. (2021). *Transparency International.*

Guba, E. G. (1990). *The Alternative Paradigm Dialog.* Sage Publication.

Hadilinatih, B. (2018). Collaborative Governance Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Enersia Publika*, 2(3), 1–13.

Hidayat Pratama. (2020). *Filosofi Pengawasan Pelayanan Publik.* Ombudsman.Go.Id.

Joko Widodo. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik.* edia Nusa Creative (MNC Publishing).
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Widodo+kemudian+menambahkan+bahwa++informasi++perlu++disampaikan++kepada+pelaku++kebijakan++agar++pelaku++kebijakan++dapat+memahami++apa++yang++menjadi++isi,++tujuan,++arah,+kelom>

Mikhael, W. (2017). *Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik*

Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. *Lex Privatum*, 5(1), 97–104.

Nikmatur, R. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 63.

Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Cakra Books*, 1(1), 305.

Olsson, J. (2008). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 信阳师范学院, 1(1), 305.

<http://e->

journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdp

[b/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.](http://b/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org)

04.758%0Awww.iosrjournals.org

PECB Beyond Recognition. (2022). *Naik 1, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2021 Masih Di bawah Rata-rata.*

Pendidikan, J., & Konseling, D. (2022). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia*. 4, 4728–4732.

Perwakilan: Kepulauan Riau. (2019). *Kolaborasi Ombudsman dan KPK Dalam Pemberantasan dan Pengawasan Pelayanan Publik*. Ombudsman.Go.Id.

Press, G. M. U. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. In Agus Dwiyanto.

Rismawati, S. E., & Mattalata, S. E. (2018). *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja*

Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan. Celebes Media Perkasa.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ni9tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Menurut+Sulistiyani+\(2004\)+mengemukakan+bahwa+hubungan+kerjasama+atau+kemitraan+dapat+berjalan+dengan+baik+jika+dilandasi+oleh+prinsip-prinsip+yang+mendukungnya,+yakni:+a\)%09Kesam](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ni9tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Menurut+Sulistiyani+(2004)+mengemukakan+bahwa+hubungan+kerjasama+atau+kemitraan+dapat+berjalan+dengan+baik+jika+dilandasi+oleh+prinsip-prinsip+yang+mendukungnya,+yakni:+a)%09Kesam)

Satria, H. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.

INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(2), 169–186.

<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>

Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*,

19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>

SUGANDHA, W. (2009). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor*

12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1(1), 109–122. <http://eprints.undip.ac.id/17668/>

Tarigan, Y., Palilingan, T. N., & Gerungan, C. A. (2020). *KEKUATAN HUKUM*

REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM

PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Taufan Fahrur Ridho. (2018). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman*

Republik Indonesia Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Ombudsman

Perwakilan Nusa Tenggara Barat).

Umanailo, M. C. B. (2019). Paradigma Konstruktivis Preprints. *Researchgate*,

October, 96–97. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9ja2t>

Upi Fitriyanti. (2020). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Ombudsman.Go.Id.

Wicipto Setiadi. (2018). *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 1–14.

Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>

Wicipto Setiadi. (2018). *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 1–14. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234>

Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Dasar Pasal 13 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Semua Jenjang Pendidikan

Undang-undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Dasar Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-undang Dasar Pasal 35 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Nota Kesepahaman Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2019 dan Nomor 01/ORI-MOU/III/2019 tentang Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Website:

Global Highlights. (2021). *Transparency International*.

<https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-global-highlights.12>

[Februari 2021](#)

Hidayat Pratama. (2020). *Filosofi Pengawasan Pelayanan Publik*.

Ombudsman.Go.Id. [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--filosofi-](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--filosofi-pengawasan-pelayanan-publik)

[pengawasan-pelayanan-publik](#)

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Kpk Tahan Menteri Sosial Terkait Perkara*

Dugaan Suap Pengadaan Bansos Covid-19. Siaran Pers.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1986-kpk-tahan-menteri->

[sosial-terkait-perkara-dugaan-suap-pengadaan-bansos-covid-19](#)

Pecb Beyond Recognition. (2022). *Naik 1, Skor Indeks Persepsi Korupsi (Cpi)*

Indonesia Tahun 2021 Masih Di bawah Rata-Rata.

[https://Sustain.Id/2022/02/03/Naik-1-Skor-Indeks-Persepsi-Korupsi-Cpi-Indonesia-Tahun-2021-Masih-Di bawah-Rata-Rata/](https://Sustain.Id/2022/02/03/Naik-1-Skor-Indeks-Persepsi-Korupsi-Cpi-Indonesia-Tahun-2021-Masih-Di-bawah-Rata-Rata/)

Perwakilan: Kepulauan Riau. (2019). *Kolaborasi Ombudsman Dan Kpk Dalam Pemberantasan Dan Pengawasan Pelayanan Publik*. Ombudsman.Go.Id.

<https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/R/Pwk--Kolaborasi-Ombudsman-Dan-Kpk-Dalam-Pemberantasan-Dan-Pengawasan-Pelayanan-Publik>

Upi Fitriyanti. (2020). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Ombudsman.Go.Id.

<https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Pengawasan-Pelayanan-Publik->

